



Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Politik Legislasi: Analisis Risiko Hukum dan Beban Fiskal Negara

Ade Saputra Dinata^{1*}, Meydilah Ayunafisah², Vera Ayu Lestari³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dedssputra@gmail.com

Abstract. *The government policy known as the Free Nutritional Meal Program (MBG) aims to improve public nutrition and reduce stunting rates in Indonesia. The purpose of this study is to examine the MBG Program from a political perspective, particularly considering political dynamics, legal risks, and fiscal issues. This research was conducted through literature review, reviewing various journals and academic sources. The results indicate that the MBG not only has social impacts but also influences political interests, poses risks to legal enforcement, and disrupts the sustainability of the state budget. Therefore, for the program to be successful and sustainable, strong regulations and oversight are required. Furthermore, this populist program is often utilized as an instrument for power legitimacy, demanding compromises between the executive and legislative branches during its budget approval process. Without a detailed legal framework, the policy's implementation is highly vulnerable to overlapping institutional authority and potential misappropriation of funds. Ultimately, technology-based monitoring strategies and accountable governance are the main keys to maintaining the stability of the State Budget (APBN).*

Keywords: *Fiscal Burden; Legal Risks; Legislative Politics; MBG; Public Policy.*

Abstrak. Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Program MBG dari sudut pandang politik, terutama dengan mempertimbangkan dinamika politik, risiko hukum, dan masalah fiskal. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian literatur dengan melihat berbagai jurnal dan sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berdampak sosial tetapi juga memengaruhi kepentingan politik, menimbulkan risiko untuk pelaksanaan hukum, dan mengganggu keberlanjutan anggaran negara. Oleh karena itu, agar program berhasil dan berkelanjutan, diperlukan peraturan dan pengawasan yang kuat. Selain itu, program populis ini sering kali digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan yang menuntut kompromi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam persetujuan anggarannya. Tanpa kerangka hukum yang detail, implementasi kebijakan sangat rentan terhadap tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan potensi penyalahgunaan dana. Pada akhirnya, strategi pengawasan berbasis teknologi dan tata kelola yang akuntabel menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kata kunci: Beban Fiskal; Kebijakan Publik; MBG; Politik Legislasi; Risiko Hukum.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan kesehatan nasional di Indonesia yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, prevalensi stunting pada anak Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir (RI 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan kapasitas negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik,

perkembangan kognitif, hingga produktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang sehingga menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional.

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah telah menjalankan berbagai program penanggulangan gizi seperti bantuan sosial pangan, posyandu, pemberian vitamin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Arif et al. 2020). Namun, berbagai kebijakan tersebut dinilai masih bersifat parsial dan belum mampu menyelesaikan akar persoalan secara menyeluruh. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurunnya daya beli masyarakat serta terbatasnya akses terhadap pangan bergizi menyebabkan risiko stunting dan malnutrisi semakin meningkat di berbagai daerah (Simanjuntak and Erwinsyah 2020).

Dalam situasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya diperkenalkan dalam kampanye Pemilu 2024 (Rahayu 2025). MBG dirancang sebagai program nasional dengan cakupan luas melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dengan dukungan anggaran negara yang besar. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani lokal dan UMKM pangan.

Namun demikian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan sosial semata. Dalam perspektif politik legislasi, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan kepentingan aktor negara, relasi kekuasaan, agenda politik, serta proses formulasi kebijakan dalam sistem pemerintahan. Kemunculan MBG sebagai program unggulan pemerintahan baru menunjukkan adanya hubungan erat antara kebijakan publik dan kepentingan elektoral (Kiftiyah 2025a). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas persoalan gizi nasional, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi politik pemerintah dalam memperoleh dukungan masyarakat. Selain itu, implementasi MBG juga menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam aspek fiskal dan hukum. Besarnya kebutuhan anggaran negara untuk menjalankan program secara nasional menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan APBN dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Kompleksitas distribusi makanan, keterlibatan banyak lembaga negara, serta pengawasan kualitas pangan berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum seperti

penyalahgunaan anggaran, ketidaktepatan distribusi, konflik kewenangan antar lembaga, hingga kelalaian dalam penyediaan makanan yang aman dan layak konsumsi.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan penanggulangan stunting. Penelitian pertama oleh Kiftiyah dkk. dalam artikel Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial–Politik menjelaskan bahwa MBG merupakan kebijakan unggulan pemerintahan baru yang memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana program MBG dipandang sebagai bentuk implementasi keadilan sosial sekaligus instrumen politik pemerintah dalam membangun legitimasi publik. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek sosial-politik dan belum membahas secara mendalam relasi politik legislasi serta implikasi fiskalnya (Kiftiyah 2025a).

Penelitian kedua oleh Luis Fiska Rahayu berjudul Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia meneliti bagaimana dukungan politik masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memperoleh dukungan luas karena dianggap mampu mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan implementasi berupa pengawasan yang lemah, risiko distribusi, dan keterbatasan pembiayaan program. Penelitian tersebut lebih menekankan aspek dukungan politik dan implementasi kebijakan dibandingkan analisis politik legislasi dan hubungan eksekutif–legislatif secara spesifik (Rahayu 2025).

Penelitian ketiga dalam perspektif hukum, penelitian Abdullah Fikri yang berjudul Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme menjelaskan bahwa MBG merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas pangan bergizi. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan adanya persoalan terkait lemahnya dasar hukum, kesiapan kelembagaan, dan potensi pelanggaran prinsip *good governance* dalam implementasi program. Fokus utama penelitian ini terletak pada aspek konstitusional dan perlindungan hukum masyarakat, sehingga belum membahas secara mendalam pengaruh politik elektoral terhadap pembentukan kebijakan MBG (Fikri 2025a).

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Gustia Nengsih dan Desi Sommaliagustina melalui artikel Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan. Penelitian ini membahas efektivitas MBG dalam mendukung hak anak atas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada pengawasan distribusi, standar keamanan pangan, dan kesiapan regulasi pelaksanaan. Meskipun demikian, penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum pendidikan dan belum mengkaji beban fiskal serta dinamika politik legislasi dalam program MBG (Nengsih 2026).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak membahas aspek sosial, kesehatan, hukum normatif, dan implementasi kebijakan. Sementara itu, kajian yang membahas MBG dalam perspektif politik legislasi masih relatif terbatas. Padahal, pembentukan dan implementasi kebijakan MBG menunjukkan adanya hubungan erat antara proses politik, formulasi kebijakan publik, serta relasi antara aktor eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, terdapat gap penelitian mengenai bagaimana dinamika politik legislasi mempengaruhi pembentukan kebijakan MBG beserta implikasi fiskal dan risiko hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif politik legislasi dengan menyoroti dinamika pembentukan kebijakan, relasi aktor politik, tantangan fiskal negara, serta risiko hukum dalam implementasinya. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai MBG sebagai produk kebijakan publik yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga memiliki implikasi politik dan hukum yang luas.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana Program MBG dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral dan relasi eksekutif-legislatif?
2. Apa risiko hukum utama dari desain dan implementasi Program MBG?
3. Bagaimana beban fiskal MBG memengaruhi keberlanjutan anggaran dan strategi regulasinya?

2. LANDASAN TEORI

Teori Politik Legislasi Moh. Mahfud MD (2012)

Penelitian ini menggunakan teori politik legislasi yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD untuk menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politik legislasi merupakan kajian yang melihat bahwa pembentukan hukum dan kebijakan publik tidak pernah terlepas dari dinamika politik, relasi kekuasaan, dan kepentingan aktor negara. Dalam perspektif ini, hukum bukan hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai hasil dari proses politik yang dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dan kekuasaan politik.

Menurut Mahfud MD (2012), politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan tujuan hukum yang dibentuk oleh negara. Produk hukum yang lahir dalam suatu pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang pada masa tersebut. Oleh karena itu, pembentukan hukum sering kali mencerminkan kepentingan kekuasaan yang dominan dalam sistem pemerintahan. Selain itu, Mahfud MD juga menekankan bahwa politik hukum harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, dan keadilan sosial agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Lorenza dan Mulyadi (2026) yang menjelaskan bahwa praktik legislasi di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite politik dan kompromi kekuasaan dibandingkan kepentingan publik secara substantif. Legislasi yang terlalu dipengaruhi kepentingan politik berpotensi kehilangan orientasi keadilan sosial dan hanya menekankan kepastian formal dalam pembentukan hukum. Selain itu, Lorenza dan Mulyadi juga menjelaskan bahwa hukum yang dibentuk tanpa partisipasi publik dan pengawasan yang kuat dapat menyebabkan terjadinya dominasi kekuasaan dalam proses legislasi.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), teori politik legislasi digunakan untuk melihat bahwa program tersebut tidak hanya hadir sebagai kebijakan sosial dalam mengatasi stunting dan persoalan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai produk politik yang dipengaruhi oleh dinamika elektoral dan agenda pemerintahan. Program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan publik memiliki hubungan erat dengan kepentingan legitimasi politik dan dukungan masyarakat.

Selain itu, teori politik legislasi juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran, pembentukan regulasi, dan implementasi Program MBG. Pelaksanaan program yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar membutuhkan dukungan politik parlemen dan dasar regulasi yang kuat agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, teori politik legislasi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibentuk melalui proses politik, dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar lembaga negara, serta menghadapi tantangan hukum dan fiskal dalam implementasinya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber akademik lainnya. Menurut Febrianto and Siroj (2024) menjelaskan studi literatur adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Metode ini digunakan untuk memperoleh dasar konseptual, memperkuat analisis penelitian, serta memahami berbagai kajian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, khususnya dalam melihat kebijakan publik dari sudut pandang politik dan hukum. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang lebih terarah, objektif, dan didukung oleh informasi yang valid. Dengan demikian, pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif politik legislasi serta mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Elektoral dan Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan publik yang selalu terlibat dalam proses politik elektoral Indonesia. Setelah sebelumnya diperkenalkan dalam kampanye Pemilu 2024, program ini menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan populis seperti MBG sering digunakan dalam politik elektoral untuk mendapatkan legitimasi politik dan menarik dukungan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Karena memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, program yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat cenderung lebih mudah diterima publik. Akibatnya, MBG tidak hanya dianggap sebagai kebijakan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari rencana politik pemerintah untuk membangun citra yang baik dan mendorong dukungan publik untuk pemerintahan baru (Meidyana 2025).

Ketika MBG muncul, ini menunjukkan bagaimana masalah kesejahteraan sosial dan kesehatan telah menjadi bagian dari agenda politik nasional. Tekanan publik terhadap pemerintah untuk mengambil kebijakan yang cepat dan efektif karena masalah ketahanan

pangan dan stunting yang tinggi di Indonesia. Kondisi ini digunakan sebagai dorongan politik untuk membangun program yang populis dan dapat diterima masyarakat. Kebutuhan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kekuasaan sering kali memengaruhi pembentukan kebijakan publik dari perspektif politik legislasi. Oleh karena itu, MBG dapat dianggap sebagai kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan bukan hanya teknokratis tetapi juga strategi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan kepentingan politik elektoral (Gunarto 2025).

Selain dipengaruhi dinamika politik elektoral, implementasi MBG juga menunjukkan adanya relasi yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sesuai janji kampanye, pemerintah sebagai aktor eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program prioritas nasional. Pelaksanaan program dalam skala nasional membutuhkan dukungan parlemen terutama dalam pembahasan anggaran dan pembentukan regulasi. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan Indonesia, parlemen memiliki tanggung jawab utama untuk menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan mendukung berbagai program nasional. Dalam penelitian Luis Fiska Rahayu dijelaskan bahwa dukungan politik terhadap MBG sangat dipengaruhi oleh hubungan antaraktor pemerintahan, pengawasan kebijakan, serta kesiapan negara dalam mengelola program secara berkelanjutan (Rahayu 2025).

Ada proses perjanjian politik dan kompromi dalam pembentukan kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan eksekutif-legislatif selama pelaksanaan MBG. Pemerintah membutuhkan dukungan parlemen agar program dapat memperoleh legitimasi anggaran dan beroperasi dengan baik, sementara legislatif juga memiliki kepentingan politik untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap program kesejahteraan masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa interaksi politik antara antaraktor negara yang memiliki kepentingan berbeda menciptakan kebijakan publik. Dalam konteks ini, dukungan politik parlemen sangat penting untuk memastikan program MBG akan bertahan, terutama karena program tersebut membutuhkan anggaran negara yang besar untuk pelaksanaan jangka panjang (Irawan 2026)

Selain itu, kompleksitas implementasi MBG ditunjukkan oleh keterlibatan berbagai lembaga negara, termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Banyak institusi yang terlibat menunjukkan bahwa program ini memiliki banyak aspek administratif dan politik. Dalam hal politik legislasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan dan pembagian kewenangan yang jelas sangat penting agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan konflik

administratif atau tumpang tindih tanggung jawab antar lembaga negara. Jika tidak ada koordinasi yang baik, pelaksanaan program dapat menghadapi banyak tantangan, seperti birokrasi yang tidak efektif, penundaan dalam penyediaan bantuan, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara (Sofya 2025).

Dari sudut pandang politik legislasi, kebijakan publik pada dasarnya dibentuk oleh perjanjian politik antara antaraktor negara yang memiliki kepentingan yang berbeda. Akibatnya, tujuan sosial program MBG tidak hanya bergantung pada pencapaian tujuan tersebut, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk melakukan koordinasi politik dan dukungan kelembagaan selama proses legislasi dan penganggaran negara (Rahman 2025). Mahfud MD menjelaskan bahwa karakter suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang pada masa pembentukannya. Program MBG dapat dipahami sebagai kebijakan yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan sosial, tetapi juga menjadi instrumen politik pemerintah dalam membangun legitimasi dan dukungan publik. Sejalan dengan itu, Lorenza dan Mulyadi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik legislasi di Indonesia sering kali lebih merepresentasikan kompromi politik elite dibandingkan aspirasi publik secara menyeluruh.

Risiko Hukum dalam Desain dan Implementasi Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan publik berskala nasional dengan anggaran yang sangat besar, sehingga memiliki banyak risiko hukum saat dirancang dan dijalankan. Karena program melibatkan banyak aktor, proses distribusi yang rumit, dan penggunaan dana negara yang besar, ada risiko hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan memiliki kepastian hukum, akuntabilitas, dan melindungi masyarakat sebagai penerima manfaat dari perspektif hukum kebijakan publik (Fikri 2025b).

Penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi selama proses pengadaan dan distribusi bantuan merupakan ancaman hukum utama untuk pelaksanaan MBG. Karena besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program MBG, ada kemungkinan harga naik, pengadaan palsu, dan penyimpangan dalam distribusi makanan. Jika pengawasan pelaksanaan program tidak dilakukan secara jelas dan jujur, risiko tersebut meningkat. Selain itu, kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat juga dapat menjadi sumber risiko hukum. Standar higienitas dan kesehatan yang ketat diperlukan dalam proses pengolahan dan distribusi makanan dalam program MBG. Pemerintah dan pelaksana dapat menghadapi hukuman administratif dan pidana jika terjadi keracunan makanan, distribusi makanan yang

tidak layak konsumsi, atau pelanggaran standar kesehatan. Dalam konteks ini, lemahnya regulasi dan pengawasan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Nengsih 2026).

Risiko hukum lainnya berkaitan dengan ketidakjelasan pembagian kewenangan antar lembaga negara yang terlibat dalam program MBG. Banyaknya institusi yang memiliki peran dalam implementasi program berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik administratif apabila tidak diatur secara jelas dalam regulasi. Ketidakjelasan tersebut dapat mempersulit penentuan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan distribusi, penyalahgunaan anggaran, maupun kegagalan pelaksanaan program di daerah. Dalam perspektif politik legislasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kekuatan kerangka regulasi yang mengaturnya. Kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas cenderung menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi dan membuka ruang penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sistem pengawasan, serta mekanisme audit menjadi hal penting untuk meminimalisasi risiko hukum dalam pelaksanaan MBG.

Risiko hukum dalam implementasi MBG menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Mahfud MD, politik legislasi harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kepastian hukum dalam tata kelola negara. Namun, Lorenza dan Mulyadi menjelaskan bahwa praktik legislasi yang terlalu dipengaruhi kepentingan politik dapat menyebabkan hukum kehilangan orientasi keadilan substantif dan lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sistem pengawasan menjadi hal penting agar Program MBG dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Beban Fiskal MBG terhadap Keberlanjutan Anggaran dan Strategi Regulasi

Beban fiskal MBG terhadap keberlanjutan anggaran dan strategi regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran negara yang sangat besar karena cakupan program yang luas dan pelaksanaannya dilakukan secara nasional. Pembiayaan program mencakup pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, pembangunan infrastruktur dapur umum, pengawasan kualitas pangan, hingga biaya operasional pelaksanaan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, MBG menjadi salah satu program sosial dengan beban fiskal terbesar dalam kebijakan pemerintahan baru. Besarnya kebutuhan anggaran menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan APBN dalam jangka panjang. Program dengan pembiayaan besar berpotensi meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara apabila tidak

diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja publik. Selain itu, ketergantungan terhadap anggaran negara juga dapat menimbulkan risiko pembengkakan defisit fiskal apabila pelaksanaan program tidak dilakukan secara bertahap dan terukur (Weyana 2025).

Dalam perspektif politik legislasi, beban fiskal MBG menunjukkan adanya hubungan erat antara kebijakan populis dan strategi politik pemerintahan. Program populis umumnya dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam waktu cepat guna meningkatkan legitimasi politik pemerintah. Namun, kebijakan populis sering menghadapi tantangan keberlanjutan apabila tidak didukung oleh perencanaan fiskal dan regulasi yang matang. Oleh karena itu, MBG memerlukan strategi regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan stabilitas keuangan negara (Kiftiyah 2025b).

Salah satu strategi regulasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan anggaran melalui audit berkala dan digitalisasi distribusi bantuan. Pengawasan berbasis teknologi diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan transparan, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan sistem pelaksanaan bertahap berdasarkan prioritas daerah dengan tingkat stunting tertinggi agar beban fiskal negara dapat dikendalikan secara lebih efektif. Strategi lainnya adalah memperkuat pola desentralisasi pelaksanaan program melalui keterlibatan pemerintah daerah, UMKM, petani lokal, dan sektor pangan masyarakat (Virlana 2025).

Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi beban distribusi pemerintah pusat, tetapi juga dapat menciptakan dampak ekonomi lokal yang lebih luas. Pengalaman negara seperti Brazil dan India menunjukkan bahwa keberhasilan program makan sekolah sangat dipengaruhi oleh tata kelola lokal, pengawasan partisipatif, dan regulasi yang jelas. Dengan demikian, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola beban fiskal melalui strategi regulasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tanpa penguatan regulasi dan pengawasan yang memadai, program MBG berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas anggaran negara serta membuka ruang penyimpangan dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam perspektif politik legislasi, kebijakan publik yang bersifat populis memerlukan dukungan regulasi dan perencanaan anggaran yang matang agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Program MBG menunjukkan adanya hubungan antara kepentingan politik pemerintah dengan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Lorenza dan Mulyadi menjelaskan bahwa dominasi kepentingan politik dalam legislasi dapat menyebabkan

kebijakan lebih berorientasi pada stabilisasi kekuasaan dibandingkan kepentingan publik jangka Panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memberikan keuntungan politik jangka pendek, tetapi juga tetap menjaga stabilitas fiskal negara dan prinsip keadilan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan publik yang dikenal sebagai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengatasi stunting. Selain itu, program ini dipengaruhi oleh pergeseran kekuasaan dalam pemerintahan dan dinamika pilihan raya. MBG menunjukkan dari perspektif politik legislatif bahwa kepentingan politik, legitimasi pemerintah, dan dukungan lembaga eksekutif dan legislatif sangat berkaitan dengan kebijakan publik.

Selain itu, penggunaan MBG menghadapi sejumlah ancaman hukum, termasuk penyalahgunaan anggaran, kurangnya pengawasan distribusi, ketidakjelasan kewenangan antar lembaga, dan masalah keamanan pangan. Di sisi lain, anggaran program yang besar juga menimbulkan tantangan fiskal terhadap keberlanjutan APBN. Sebab itu, agar program MBG dapat berjalan secara efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan tata kelola kebijakan yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSATAKA

- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi literatur: Landasan dalam memilih metode penelitian yang tepat. *Journal Educational Research and Development*, 1(2), 259–263.
- Fikri, A. (2025a). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437–459.
- Fikri, A. (2025b). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 438–459.
- Gunarto, H. (2025). Setahun Prabowo: Program prioritas dengan kepedulian sosial tinggi. *Investortrust*. <https://investortrust.id/indepth/82648/setahunprabowo-program-prioritas-dengan-kepedulian-sosial-tinggi.com>
- Irawan, W. (2026). Anggota DPR apresiasi dukungan semua pihak terhadap program MBG. *AntaraNews*. <https://www.antarane.ws.com/berita/5418950/anggota-dpr-apresiasidukungan-semua-pihak-terhadap-program-mbg.com>

- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. *Kemendes RI*, 1207, 1–16.
- Kiftiyah. (2025a). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1). (Catatan: Referensi ini tampak tidak lengkap pada draf Anda karena tidak ada judul artikelnya).
- Kiftiyah, A. (2025b). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial - politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 102–112.
- Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca arah politik hukum Indonesia: Telaah kritis terhadap logika pembentukan hukum nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- MD, M. M. (2012). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Meidyana, A. (2025). MBG tetap jadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran di 2026. *MetroTVnews*. <https://www.metrotvnews.com/play/NQACY1XO-mbg-tetap-jadi-programprioritas-pemerintahan-prabowo-gibran-di-2026.com>
- Nengsih, G. (2026). *Tinjauan hukum terhadap efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan*. (Catatan: Nama jurnal/institusi penerbit belum tercantum dalam draf Anda).
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika dukungan politik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 815–831.
- Rahman, A. (2025). Reformasi program makan bergizi gratis untuk pemenuhan hak sosial. 9(1), 82–104. (Catatan: Nama jurnal belum tercantum pada draf referensi ini).
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19: Telaah kritis terhadap rencana megaproyek lumbung pangan nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 184–204.
- Sofya, R. (2025). 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ini 9 program yang digulirkan. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/1-tahun-pemerintahan-prabowogibran-ini-9-program-yang-digulirkan-00-kb414-3tbjzn.com>
- Virlana, B. (2025). Kepastian hukum program makan bergizi gratis: Kajian atas usulan pemanfaatan dana zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 57–82.
- Weyana, A. (2025). Rasionalisme dalam kebijakan publik: Analisis dampak program makan bergizi gratis terhadap kesejahteraan pelajar. 3(4), 1969–1976.